

# MODEL *GOOD GOVERNANCE* SEKOLAH DASAR (SD) MELALUI PENGUATAN PERAN KOMITE SEKOLAH DI KOTA METRO

Bujang Rahman, Abdurrahman, Riswandi

## ABSTRAK

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengembangkan model *good governance* Sekolah Dasar (SD) melalui penguatan peran komite sekolah. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk: (a) menguatkan peran komite sekolah dalam membentuk *good governance* sekolah dasar, yang mencakup: memberi nasehat, mendukung, mengontrol, dan mediator atau penghubung. Kondisi ini akan dijadikan bahan untuk mengembangkan Model *Good Governance* Sekolah Dasar (SD) Melalui Penguatan Peran Komite Sekolah di Kota Metro; (b) mengimplementasikan Model *Good Governance* Sekolah Dasar (SD) Melalui Penguatan Peran Komite Sekolah di Kota Metro, yang akan berdampak pada kualitas sekolah secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*Research and Development*) yang dikembangkan oleh Borg dan Gall yang dilaksanakan dalam dua tahun kegiatan. *Tahun pertama*: tahap pengembangan model, berdasarkan data yang diperoleh dilakukan seminar terhadap model awal, merancang model awal, studi banding, merevisi, dan menghasilkan model *good governance* sekolah melalui penguatan peran komite sekolah. *Tahun kedua*: mensosialisasikan model *good governance* sekolah, melakukan uji coba model, memvalidasi dan merevisi model, mengimplementasikan model. Telah dihasilkan model *Good Governance* Sekolah Dasar (SD) Melalui Penguatan Peran Komite Sekolah di Kota Metro. Dengan hasil ini kiranya dapat menjadi *Benchmark* untuk sekolah lain dalam membentuk *good governance* sekolah.

**Kata kunci:** *good governance* sekolah, peran komite sekolah

The general objective of this research is to develop good governance model of primary school (SD) by strengthening the role of the school committee. The specific objectives to be achieved are to: (a) strengthening the role of the school committee in the form of good governance in primary schools, which include: give advice, endorse, control, and mediator or communicator. This condition will be used as material to develop good governance model of Primary School (SD) by Strengthening the Role of the School Committee in Metro City, (b) implement the Good Governance Model of Primary School (SD) by Strengthening the Role of the School Committee in Metro City, which will have an impact on the quality of the school as a whole. This research used developmental research method (Research and Development) developed by Borg and Gall conducted in two years of activity. First year: model development stage, based on the data obtained, the seminar on early models was done, designing the initial model, a comparative study, revise, and produces good governance model by strengthening the role of school committees. Second year: socialize the good governance model, test the model, validate and revise the model, implement the model. The expected outcome of this research is the establishment of Good Governance Model of primary school (SD) by Strengthening the Role of the School Committee in Metro City. From this result, it seems to be a Benchmark for other schools in forming good governance school.

**Keywords:** good governance, the role of school committee

## PENDAHULUAN

Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, menjelaskan bahwa peran komite sekolah tidak sekadar membantu sekolah dalam penggalangan dana. Akan tetapi komite sekolah mempunyai peran yang jauh lebih luas, yaitu sebagai (1) penesehat; (2) pendukung; (3) pengontrol; dan (4) mediator. Untuk menjalankan peran yang demikian besar, komite sekolah dibuat harus mandiri, artinya tidak dibawah koordinasi kepala sekolah, tetapi bermitra dengan kepala sekolah dalam memajukan sekolah.

Meski sudah diundangkan dan banyak sekolah sudah membentuk komite sekolah, namun secara nasional gaung komite sekolah belum maksimal dalam pelaksanaannya. Seperti diakui oleh Depdiknas melalui Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah Tahun 2004, banyak komite sekolah yang belum mampu mengemban peran dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundangan yang ada. Hal ini disebabkan banyak faktor. Salah satu faktor penting yang menjadi penyebab kurang berperannya komite sekolah di antaranya adalah terbatasnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur komite sekolah. Faktor lain adalah kurangnya pelatihan bagi komite sekolah, sehingga tidak mengetahui peran yang harus dilakukan untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan sebagai mitra sekolah.

Pemberdayaan dan penguatan peran dan fungsi komite sekolah, maka sekolah dapat dilakukan dengan cara membina kerja sama dengan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara komite sekolah dengan sekolah akan melahirkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan.

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar (1997), ada tiga misi yang diemban oleh setiap SD dasar, yaitu melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. *Proses edukasi*, diharapkan menjadi orang yang terdidik (*educated person*). *Proses sosialisasi*, anak diharapkan mencapai kedewasaannya secara mental maupun sosial. Sedangkan *proses transformasi*, anak diharapkan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga kebudayaan bangsa. Semua hal tersebut dalam rangka mengantarkan anak didik untuk siap memasuki SMP. Sekolah Dasar yang bermutu dapat dilihat berdasarkan ada dua model teoretik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hoy dan Ferguson dalam Bafadal(2006), yaitu model tujuan dan model sistem.

### 1. Model Tujuan (*Pencapaian Tujuan*)

Model ini berdasarkan pada pandangan tradisional tentang keefektifan organisasi. Dalam pandangan tradisional, organisasi dikatakan efektif apabila ia mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengukurannya melalui melihat tujuan-tujuan operasional yang telah dicapai organisasi, yakni ditandai dengan prestasi lulusan sekolah dalam bidang keterampilan dasar yang diukur melalui tes prestasi terstandar.

### 2. Model Sistem (*pendekatan proses/multidimensional*)

Model ini berdasarkan pada konsep sistem terbuka, yang terdiri dari masukan, transformasi, dan keluaran. Ada dua asumsi yang mendasarinya, *pertama*; organisasi merupakan sebuah sistem terbuka yang harus mampu memanfaatkan dan merefleksikan lingkungan sekitarnya. *Kedua*; organisasi merupakan sebuah sistem yang dinamis, dan setelah menjadi besar maka kebutuhannya semakin kompleks, sehingga tidak mungkin didefinisikan hanya melalui sejumlah kecil tujuan organisasi yang bermakna. Berorientasi pada model sistem maka baik-tidaknya sekolah dilihat dari proses dan kondisinya, yang disebut dengan karakteristik sekolah. Menurut Owens (1987) terdapat dua karakteristik sekolah, yaitu *pertama*; karakteristik internal sekolah, yang meliputi gaya kepemimpinan, proses komunikasi, sistem supervisi dan evaluasi, sistem pengajaran, kedisiplinan, dan proses pembuatan keputusan.

*Kedua*; karakteristik eksternal yang merupakan karakteristik situasi dalam sekolah sebagai sebuah organisasi berada dan terletak, yaitu berkaitan dengan karakteristik masyarakat, seperti kekayaan, tradisi sosio-kultural, struktur kekuatan politik, dan demografinya.

### **3. Model Tujuan-Sistem**

Model ini merupakan kombinasi kedua model di atas, dimana kedua model tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan satu konsep tentang sekolah yang baik. Apabila pendekatan tujuan dikombinasikan dengan pendekatan sistem, siapapun orangnya akan lebih komprehensif dalam memahami kesuksesan sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Sekolah Dasar (SD) adalah satuan pendidikan dasar yang melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi dalam rangka mengantarkan anak didik untuk siap memasuki SMP atau yang sederajat, menjadikan siswa sebagai orang yang terdidik (berbudi pekerti luhur), memiliki kedewasaan mental dan sosial, serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk juga kebudayaan bangsa. Untuk mengukur Sekolah Dasar (SD) bermutu dapat ditinjau dari aspek prestasi siswa dan keefektifan organisasi, yaitu konsistensi internal, efisiensi penggunaan semua sumberdaya, dan kesuksesan dalam mekanisme kerjanya.

Keberadaan komite sekolah secara legal formal dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002. Berdasarkan Keputusan Mendiknas tersebut, komite sekolah bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Dengan demikian, maka komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.

Lebih lanjut dalam Keputusan Mendiknas tersebut dijelaskan bahwa, keberadaan komite sekolah berperan sebagai (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan (4) *Mediator* antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Terkait dengan keempat peran komite sekolah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Peran memberi pertimbangan, dilakukan komite sekolah pada aspek perencanaan sekolah (Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program sekolah, dan pengelolaan sumberdaya pendidikan.
- (2) Peran memberi dukungan, dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya, pengelolaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan anggaran.
- (3) Peran mengontrol, dilaksanakan dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, memantau pelaksanaan program sekolah, dan memantau output (keluaran) pendidikan.
- (4) Peran penghubung, menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, dinas pendidikan, dan dunia usaha dalam hal perencanaan, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumberdaya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (*Research and Development*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi secara luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji produk tersebut. Sehingga penelitian pengembangan bersifat longitudinal (bertahap bisa *multy years*).

Prosedur penelitian pengembangan menurut Gall and Borg (2003) mengungkapkan bahwa siklus R & D tersusun dalam beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: (1) Penelitian dan pengumpulan informasi (*Research and Information Collecting*), (2) Perencanaan (*Planning*), (3) Pengembangan produk pendahuluan (*Develop Preliminary Form of Product*), (4) Uji coba pendahuluan (*Preliminary Field Testing*), (5) Perbaikan produk utama (*Main Product Revision*), (6) Uji coba utama (*Main Field Testing*), (7) Perbaikan produk operasional (*Operational Product Revision*), (8) Uji coba operasional (*Operational Field Testing*), (9) Perbaikan produk akhir (*Final Product Revision*), (10) Desiminasi dan pendistribusian (*Dessimation and Distribution*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prototype model good governance Sekolah Dasar**

Telah dihasilkan prototype model good governance Sekolah Dasar dalam rangka penguatan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. Secara lengkap rancangan model ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Rancangan model *good governance* Sekolah Dasar (SD) ini merupakan kerangka konseptual yang mendeskripsikan prosedur sistematis dalam memperkuat peran komite sekolah untuk mencapai tata kelola dan tata pelayanan sekolah dasar dalam menyelenggarakan pendidikan yang bersih dan benar sesuai dengan aturan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan, partisipatif, responsif, efisien dan efektif, profesional, dan kesetaraan. Penguatan peran komite sekolah akan dapat tercapai apabila komite sekolah sebagai wadah orang tua dan masyarakat diikutsertakan atau terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan partisipasi antara orang tua dan keterlibatan masyarakat dengan pihak sekolah dalam penyelenggaraan program-program sekolah.

Komunitas sekolah merupakan sekumpulan warga yang terlibat dalam lingkungan sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung, dan perlu mengintegrasikan diri serta menciptakan hubungan (ikatan) sosial untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur yang membentuk komunitas sekolah terdiri dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam satuan pendidikan, orangtua dan keluarga, serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut. Model *good governance* SD yang telah dikembangkan dalam penelitian ini dirancang mengacu sesuai dengan kebutuhan komunitas sekolah, yakni orang tua siswa, masyarakat, dan sekolah itu sendiri. Ketiga unsur tersebut terlibat langsung dan berperanserta dalam upaya untuk *support* tercipta dan terlaksananya *good governance*. Selain itu juga, memperhatikan karakteristik *good governance*.

## II. ISI RANCANGAN

### A. Rasional

Dalam paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah dan bahkan mungkin akan sulit bekerjasama mencapai tujuan bersama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keluarga dan masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Akan tetapi, saat ini kondisi tersebut telah berubah bahkan dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan. Keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang diajarkan dan dengan menggunakan metode apa diajarkan di sekolah oleh para guru. Dalam paradigma transisional, hubungan keluarga dan sekolah sudah mulai terjalin (walaupun belum optimal), tetapi masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Dalam paradigma baru, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk untuk menciptakan *good governance* di sekolah.

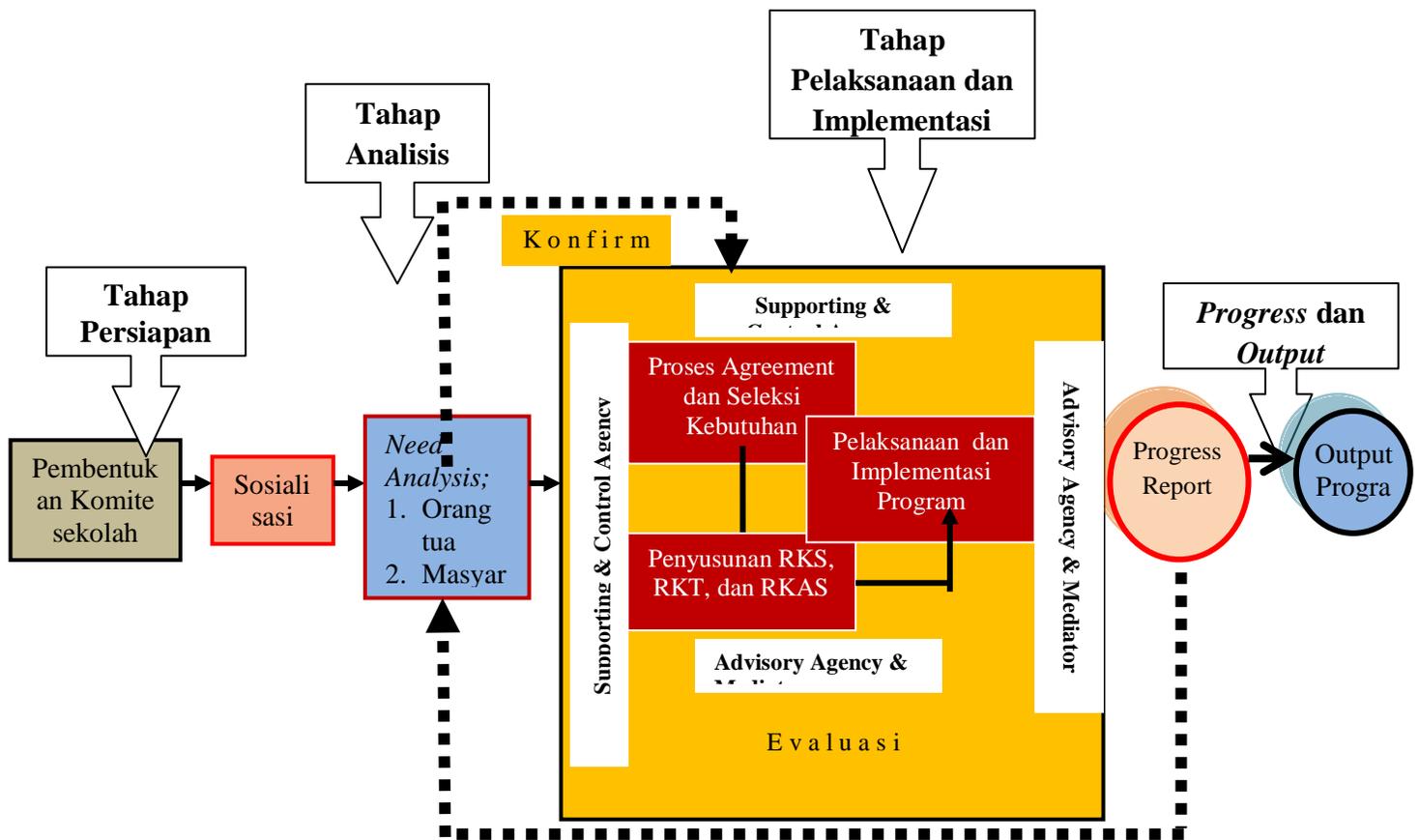
*Good governance* bagi sebuah sekolah saat ini merupakan suatu keharusan untuk diraih dan dilaksanakan. *Good governance* sekolah adalah tata pelayanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersih dan benar sesuai dengan aturan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, partisipasi, responsif, efisiensi dan efektivitas, profesional, dan kesetaraan.

### B. Landasan Teori

Ahmadjayadi (2001) menjelaskan bahwa *good governance* pada hakekatnya merupakan proses keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pengambilan keputusan penyusunan agenda pembangunan. Administrasi Publik Indonesia, melalui LAN dalam Moeljono mengindonesikan *good governance* sebagai pemerintahan yang baik dan mendefinisikannya sebagai penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks persekolahan, untuk mencapai *good governance* maka perlu adanya keterlibatan (*participation*) dari *stakeholder* sekolah, yaitu orangtua siswa, masyarakat di sekitar sekolah, dan pihak sekolah itu sendiri. Bentuk partisipasi *stakeholder* di atas dapat dilihat pada gambar 1. Partisipasi *stakeholder* tersebut diwadahi dalam komite sekolah. Keberadaan komite sekolah dilegalkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.

### C. Tahapan Model *Good Governance* Sekolah Dasar

Model *good governance* Sekolah Dasar yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan komunitas sekolah, yaitu orangtua siswa, masyarakat, dan sekolah dengan memperhatikan karakteristik *good governance*. Model *good governance* Sekolah Dasar dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2. Model *Good Governance* Sekolah Dasar (SD) Melalui Penguatan Peran Komite Sekolah**

#### **D. Sistem Pendukung**

Sistem pendukung yang diperlukan untuk dapat tercapai dan terlaksananya model *good governance* sekolah, adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten, Pengawas Sekolah Dasar (SD), Perguruan Tinggi – Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik dan Kependidikan (PT-LPTK), Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

#### **E. Indikator Kinerja (*Key Performance Indicators*)**

Sebuah model tematik yang baik, harus dicirikan oleh dampak instruksional yang mudah diukur keberhasilannya ketika model ini dioperasionalkan dalam praktek pendidikan yang sebenarnya. Di bawah ini adalah rumusan *Key Performance Indicators* (KPI) dari model *good governance* komite SD:

1. Tingkat kepercayaan orangtua terhadap sekolah semakin meningkat
2. Keterandilan terhadap program-program sekolah dari semua warga sekolah
3. Dipahami dan diterimanya RKS, RKT, dan RKAS oleh Tim Pengembang Sekolah (TPS)

4. Terciptanya kerjasama yang solid ditubuh Tim Pengembang Sekolah (TPS) dalam operasionalisasi program sekolah.

## F. Dampak Pengiring

Dampak pengiring yang diperoleh dari model ini adalah semakin meningkatnya *kepedulian* dan *partisipasi* orangtua siswa dan masyarakat dalam wadah organisasi komite sekolah melalui pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Hal ini akan menumbuhkan sikap *tanggung jawab* yang seimbang antara pihak orangtua siswa, masyarakat, dan sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam berupaya untuk meningkatkan kualitas sekolah secara komprehensif.

Penerapan model *good governance* sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan dapat terlaksananya prinsip *akuntabilitas* setiap program sekolah yang akan dan telah dilaksanakan. Dengan itu pula maka setiap anggaran atau biaya yang dibutuhkan dan digunakan perlu dilaporkan secara *transparan* kepada komunitas sekolah. Secara realitas dengan terlaksananya model ini maka akan menumbuhkan pula *kerjasama* yang kokoh, bersinergis yang berkesinambungan sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang melekat pada komunitas sekolah tersebut. Akan tetapi, tetap melaksanakan *fleksibilitas* dalam merancang, menetapkan keputusan, maupun melaksanakan program kerja.

## Tahap uji ahli model

Setelah dihasilkan prototype model *Good Governance*, selanjutnya yaitu proses uji validasi ahli model. Tahapan penelitian yang telah dilakukan yaitu mencapai pada tahap uji validasi model dilakukan oleh pakar manajemen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), pakar manajemen Universitas Lampung (UNILA), dan pengawas Sekolah Dasar (SD) kota Metro. Hasil validasi ahli dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil validasi ahli

No	Pertanyaan	Hasil penilaian				Saran/majukan untuk perbaikan
		1	2	3	4	
1	Apakah rancangan model <i>Good Governance</i> telah sesuai dengan kebutuhan orang tua, sekolah, dan masyarakat?	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai √	
2	Apakah landasan teori yang digunakan telah sesuai dengan <i>Good Governance</i> yang dirancang?	Tidak sesuai	Sebagian tidak sesuai	Sesuai √	Sangat sesuai	

3	Apakah susunan tahapan model <i>Good Governance</i> telah sesuai?	Tidak sesuai	Sebagian tidak sesuai	Sesuai	Sangat sesuai √	
4	Pada tahap persiapan model <i>Good Governance</i> apakah persiapan yang dilakukan sudah sistematis?	Tidak sistematis	Kurang sistematis	Sistematis	Sangat sistematis √	
5	Pada tahap analisis kebutuhan apakah kisi-kisi kebutuhan yang diajukan kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat telah sesuai dengan kebutuhan?	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai √	
6	Pada tahap pelaksanaan dan implementasi apakah langkah-langkah pelaksanaannya telah sesuai urutan dan strukturnya?	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai √	Sangat sesuai	
7	Pada tahap progress report dan output, apakah tahapannya dilakukan secara tepat?	Tidak tepat	Kurang tepat	Tepat	Sangat tepat √	
8	Apakah evaluasi pada model <i>Good Governance</i> dapat mengukur tujuan program?	Tidak sama sekali	Sebagian kecil ya	Sebagian besar ya √	Ya, seluruhnya	
9	Apakah sistem pendukung yang diperlukan untuk tercapai dan terlaksananya model <i>Good Governance</i> telah sesuai dengan komponen yang dibutuhkan ?	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai √	
10	Apakah dampak pengiring yang diperoleh dari model <i>Good Governance</i> sesuai dengan tujuan dilaksanakannya model tersebut ?	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai √	Sangat sesuai	

11	Bagaimana dengan keterbacaan pada isi rancangan model?	Sulit dipahami	Sebagian sulit dipahami	Sudah memadai √	Sangat memadai	
12	Apakah referensi yang mendukung pengembangan model <i>Good Governance</i> Sekolah Dasar sudah memadai ?	Sangat kurang	Masih kurang	Memadai	Sangat memadai √	

Berdasarkan uji ahli yang telah dilakukan pengujian memberikan saran dan masukan diantaranya, prinsip model *Good Governance* sudah baik, namun aktifitas pada setiap tahapan perlu dijelaskan secara sistematis, kemudian setiap komponen yang terlibat juga perlu dipetakan, dan model *Good Governance* juga perlu diuji dengan model MBS yang telah dibuat oleh UNICEF dan ADB.

## KESIMPULAN

Telah berhasil dikembangkan model *Good Governance* komite Sekolah Dasar (SD) melalui penguatan peran komite sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Pola dan Strategi Peningkatan Mutu SD*. Jakarta: Direktorat TK dan SD, 1997.

Anonim, Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Teknis Kepala Sekolah, Penguatan Komite Sekolah/Madrasah untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik*. Jakarta: Kemendiknas dan Kemenag, 2009.

Cahyana Ahmadjayadi, *Perspektif Nasional dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance*. Makalah Seminar Nasional Otonomi Indonesia “Peluang dan Tantangan Implementasi Otonomi Daerah, 22-24 Oktober 2001, Jakarta.

Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Meredith D. Gall, Joyce P. Gall, and Walter R. Borg., *Educational Research; An Introduction*. Seventh Edition. Boston: Allyn and Bacon, 2003.

Owens, R. G., *Organizational Behaviour in Education. Third Edition*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall Inc, 1987.

